

Pemko-BP Batam MEMANAS

Surat Gubernur ke Presiden Jadi Pemicu

Polemik antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, memanas. Sejak kemarin, beredar tagar #SaveFTZ, #SaveBatam, Selamatkan Batam.

MARTUA BUTAR-BUTAR, Batam

TANDA pagar itu viral di media sosial setelah di kalangan pengusaha beredar surat Gubernur Kepri H Nurdin Basirun kepada Presiden RI Joko Widodo yang ditenggarai bukan murni ide sang Gubernur. Dalam surat itu, salah satunya meminta Wali Kota Batam Rudi dijadikan *ex-officio* Kepala BP Batam.

Setelah surat itu beredar, pengusaha di Batam beramai-ramai menyurati Presiden menolak permintaan tersebut. Termasuk menolak transformasi FTZ ke KEK. Sebagaimana surat Gubernur Kepri menyebutkan, sebagai upaya percepatan

transformasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) menjadi KEK.

"Akan lebih mudah dilakukan melalui penunjukan Wali Kota Batam menjadi *ex-officio* Kepala BP," demikian bunyi surat itu.

Latar belakang sebagai dasar pertimbangannya disebut, koordinasi dan komunikasi yang selama ini menjadi salah satu faktor menentukan pelaksanaan percepatan transformasi KPBPB menjadi KEK dapat teratasi. Permasalahan dualisme kewenangan pada masa transisi menuju KEK dapat diselesaikan.

Bersambung ke Hal 7

Tolak Transformasi FTZ ke KEK

RENCANA transformasi dari *Free Trade Zone* (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membuat suasana di Batam memanas. Pro kontra terjadi.

Apalagi Gubernur Kepri mengusulkan agar KEK nanti di

bawah kendali Wali Kota Batam, Rudi (*ex officio*). Dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam belum diketahui apakah tetap mengendalikan FTZ atau tidak.

Pengusaha pun mempertanyakan apa maksud usulan

Bersambung ke Hal 7



Surat nomor 120/0586/SET, tertanggal 20 April 2018, perihal transformasi KPBPB menjadi KEK Batam itu ditembuskan ke Menko Perekonomian, Mensesneg, Mendagri, MenkumHAM, Menkeu, Mendag, Menteri ATR, Ketua DPRD Kepri dan Wako Batam.

Dalam surat itu juga disinggung, hasil rapat terbatas antara Menko Perekonomian, Gubernur, Wako dan Kepala BP, 5 April 2018 yang memberikan arahan kepada Pemko dan BP segera merumuskan agenda pelaksanaan transformasi KPBPB menjadi KEK dalam 2 tahun ke depan.

Namun dalam hal ini, Gubernur menilai pelaksanaan transformasi menjadi KEK perlu dipercepat. Seperti pembahasan penentuan rencana zona KEK, kebijakan pertanahan pada kawasan pemukiman yang berada di luar KEK dan pemberian insentif pada kawasan industri di luar zona KEK, termasuk penyerahan aset fasilitas umum/sosial dari BP ke Pemko Batam.

Selain itu dalam surat itu disebutkan, berbagai agenda yang telah disusun dalam rangka penyelesaian tahapan transformasi KPBPB menjadi KEK, akan lebih mudah dilakukan karena BP Batam maupun Pemko berada di bawah satu kendali kepemimpinan, dalam bidang pelaksanaan pemerintah, koordinasi pembangunan dan pembinaan masyarakat.

"Memudahkan kelancaran pelaksanaan serah terima aset dari BP ke Pemko sebagaimana diagendakan. Memudahkan melakukan reorganisasi dan

restrukturisasi SDM BP Batam ke depan," sambungannya.

Setelah surat itu beredar di kalangan pengusaha Kadin Provinsi Kepri kemudian mengeluarkan surat nomor 39/KU/KADIN KEPRI/IV/2018, tertanggal 27 April 2017.

Surat perihal usulan dan tanggapan KEK itu ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan para Menteri, Panglima TNI, Kapolri termaksud Gubernur Kepri, Wali Kota Batam yang menjadi Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam.

Ditembuskan juga ke Wapres Jusuf Kalla, Komisi II DPR RI, Kepala BP Batam dan Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN).

Surat yang ditandatangani Ketua Kadin Kepri, Maaruf Maulana itu menyebutkan, jika surat mereka meneruskan usulan serta aspirasi segenap pengusaha yang bergabung dalam asosiasi maupun himpunan pengusaha dalam wadah Kadin Kepri. Surat itu berkaitan tata kelola kawasan akan dilakukan perubahan dari status FTZ 70 Tahun menjadi KEK.

"Dengan segala pertimbangan dan pengalaman yang ada, menyampaikan keberatan/penolakan untuk Batam diubah menjadi KEK/enclave. Harapan untuk tetap sebagai FTZ sampai batas waktu yang telah diberikan negara," tegasnya.

Dalam lampiran surat itu, disampaikan pernyataan asosiasi pengusaha di bawah Kadin Kepri. Diantaranya, Apindo Kepri, REI Khusus Batam, Forppi, Asprindo Kepri, Depopinda

Batam, Gapeksindo, Akklindo Kepri, Organda, Batam, BSOA, INSA Batam, PHRI Batam, ASITA Kepri, HIPPI, Aexipindo,

Para asosiasi pengusaha yang menandatangani pernyataan itu menyatakan, keberatan dan menolak perubahan Batam menjadi KEK.

Batam dari awal pembangunan yang didasarkan atas Kepres 41 tahun 73, dikatakan ditetapkan sebagai daerah industri dengan sistem pemerintahan terpusat.

Tata kelola pemerintahan dan perekonomian dapat dikategorikan sebagai fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis untuk kepentingan nasional.

Maka kepemimpinannya langsung dibawah kendali Presiden dengan mengangkat Ketua Otorita sebagai pelaksana Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, walaupun belum tegas di aturan oleh UUD 1945.

Bahwa, sebelum Batam ditetapkan sebagai daerah otonom, apa yang telah dilakukan selama itu, Batam telah diperlakukan dan diberikan insentif ekonominya secara defakto adalah *Free Trade Zone*, walaupun de jure-nya sebagai *bonded ware house* yang pemerintahannya bersifat tertentu diperkuat berdasarkan atas Amandemen UUD 1945 pasal 18 A, B pada tahun 1999.

Secara yuridis Batam sebagai daerah PBPB merupakan organ dari pemerintah pusat di daerah dengan penegasan seluruh aset BP Kawasan Batam merupakan aset negara

yang tidak dipisahkan.

Setelah perjalanan yang panjang akhirnya di tahun 2007 tata kelola insentif Batam diperkuat secara yuridis berdasarkan atas PP 46 tahun 2007 yang diperkuat dengan UU 44 tahun 2007 Batam ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas yang diberikan kekhususan berlaku selama 70 Tahun.

Ditegaskannya, rencana mengubah Batam dari FTZ yang belum separuh jalan, akan diubah jadi KEK, sebagai kemunduran. Karena itu, pelaku usaha yang bernaung di bawah Kadin Provinsi Kepri bersama asosiasi dan himpunan menyampaikan harapannya.

Meminta agar BP Batam dikembalikan, langsung di bawah Presiden, seperti awal dibangun dalam bentuk Otorita dengan fasilitas KEK maritim menyeluruh atau minimal tetap dalam FTZ menyeluruh dengan penambahan insentif tertentu sesuai kebutuhan.

Diminta agar pemerintah pusat tidak tergesa-gesa untuk menetapkan Batam menjadi KEK. Alasannya, KEK sangat merugikan masyarakat dan pengusaha yang diluar KEK *Enclave* walau polanya insentif-nya disamakan seperti FTZ.

"Berdasarkan pengalaman sangat rumit dalam tata kelola kepabeannya. Mohon jangan sampai daerah seperti Batam sejak awal dibangun bagian dari pemerintah bersifat tertentu jadi daerah bersifat umum seperti daerah lain di Indonesia yang baru diberikan fasilitas KEK," tegas mereka.***

Ekonomi.....

2018 (yon-y) tumbuh sebesar 4,37 persen. Sementara itu, pertumbuhan (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -0,68 persen.

Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional pada triwulan ini masih didominasi oleh Provinsi Riau sebesar 23,19 persen, diikuti Sumatera Utara sebesar 22,90 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 12,86 persen. Sedangkan Kepri menempati posisi kelima dengan *share* sebesar 7,85 persen.

Struktur ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2018 menurut pengeluaran didominasi oleh PMTB sebesar 42,67 persen diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 39,80 persen.

Net Ekspor sebesar 13,98 persen; dan Konsumsi Pemerintah sebesar 3,03 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori kurang dari 1 persen. Ketua Komisi dua bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kepri Hotman Hutapea mengaku, bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tumbuh di angka 4 persen di triwulan pertama, 60 persen berasal dari aktivitas pengolahan industri di Kota Batam.

Di samping itu juga, dirinya menambahkan, dengan tumbuhnya capaian angka di atas 4 persen tersebut, sebagai bentuk keberhasilan Gubernur Nurdin mendorong keterpukan pertumbuhan ekonomi

dimana tahun sebelumnya Kepri, terdapat perlambatan yang sangat patal.

"Otomatis, dengan pertumbuhan 4,47 persen ini posisi yang sebelumnya nomor dua paling akhir, sekarang peringkat 29 dari 33 provinsi lainnya di seluruh Indonesia," terang Hotman.

Sebelumnya, Hotman memaparkan, pada triwulan pertama tahun 2017, capaian pertumbuhan ekonomi Kepri 2,02 persen atau peringkat 33 setelah Riau. Capaian ini, tentu akan semakin baik, jika ke depan pemerintah bisa memanfaatkan berbagai sumber infrastruktur yang saat ini belum sama sekali dikelola.

"Kelola lah segera infrastruktur lainnya, jamin pasti akan jauh lebih baik

lagi," saran Hotman.

Tak hanya Hotman, anggota komisi dua lainnya, Rudy Chua menambahkan, capaian 4,47 persen itu merupakan suatu pencapaian yang baik. Akan tetapi, pemerintah diharapkan tidak berpuas diri dengan hasil tersebut karena masih jauh dari prestasi yang pernah dicapai Kepri masa lalu.

"Saran kami, Pemda perlu meningkatkan kemudahan perizinan dan memperbaiki infrastruktur yang ada, apalagi saat ini kita menghadapi persaingan dalam menarik investasi bukan saja dengan luar seperti Vietnam, Tiongkok, tetapi kita juga harus bersaing keras dengan provinsi lainnya, untuk merebut investasi," papar Rudi. (ais)

Disdik Siapkan Aplikasi PPDB Sistem Zonasi

BATAM - Dinas Pendidikan Kota Batam siapkan aplikasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018. Aplikasi ini berbeda dengan yang dipakai tahun sebelumnya karena terjadi perubahan sistem PPDB.

"Tahun lalu kan sistem rayon. Tahun ini berdasarkan zonasi. Jadi aplikasinya juga buat baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Hendri Arulan di Batam.

Aplikasi ini nantinya dapat diunduh di *Playstore* untuk telepon genggam berbasis Android. Sehingga pelaksanaan PPDB secara daring tetap bisa berjalan.

Menurut Hendri, dengan sistem zonasi, siswa yang berdomisili di sekitar sekolah wajib diterima di

sekolah tersebut. Sistem ini dipakai dengan tujuan agar tidak ada siswa yang bersekolah jauh dari rumah.

"Dengan sistem ini, meskipun di kecamatan hanya ada satu sekolah negeri, warganya bisa tetap sekolah di kecamatan terdekat. Misal di Lubukbaja, cuma ada satu SMP negeri, yang rumahnya di ujung-ujung, bisa sekolah di Batuampar," tuturnya.

Untuk menyosialisasikan sistem zonasi dan daring ini, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan sekolah-sekolah.

"Kita akan sosialisasikan dalam waktu dekat. Aplikasinya juga dalam proses pembuatan. Kita harap segera selesai," ujar Sekretaris Disdik ini.

PPDB rencananya dilaksanakan di awal Juli. Namun untuk sekolah swasta, PPDB rencananya didahulukan sepekan dibanding sekolah negeri.

Dalam waktu dekat Walikota Batam, Muhammad Rudi juga berencana mengumpulkan Ketua Yayasan Pendidikan yang menjalankan sekolah swasta. Tujuannya selain untuk sosialisasi adalah meminta agar ada kemudahan pembiayaan sehingga lebih banyak masyarakat yang berminat sekolah di swasta.

"Guru sudah kita beri insentif. Kita berharap SPP tidak terlalu mahal. Atau ada kemudahan bagi siswa khususnya yang terbatas secara ekonomi," kata Rudi. (mbb)